



PALING LAMBAT PEKAN DEPAN DIKUCURKAN

Sinkronisasi Data Hambat Penyaluran Bantuan

YOGYA (KR) - Upaya Pemkot Yogya untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial dari pemerintah sedikit terhambat. Terutama disebabkan oleh sinkronisasi data dari pemerintah pusat dengan di daerah agar tidak terjadi double penerimaan bantuan.

Sejak April lalu, Pemkot Yogya sudah menyiapkan skema bantuan berupa paket sembako ke masyarakat. Akan tetapi muncul kebijakan dari pemerintah pusat sehingga Pemkot terpaksa menunda penyaluran. "Saat itu sebenarnya tinggal mengemas barang dan menyalurkan melalui pihak ketiga. Terpaksa harus dibatalkan karena perlu disesuaikan dengan program dari pusat," jelas Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, Kamis (7/5).

Total ada 53.319 KK dari total 139.108 KK di Kota Yogya yang akan

memperoleh bantuan sosial. Kuota tersebut akan disokong bersama-sama antara Kementerian Sosial, Pemda DIY serta Pemkot Yogya. Jenis bantuan sosial antara lain program reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako sebagai pengganti Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga Kartu Prakerja.

Heroe mengatakan, setiap kepala keluarga hanya bisa memperoleh satu jenis bantuan dan tidak boleh double. Data penerima bantuan pun

berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial serta non-DTKS yang diusulkan dari daerah. Kota Yogya selama ini juga memiliki data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) yang rutin divalidasi tiap tahun. "KSJPS ini jumlahnya mencapai 10 persen, sedangkan nanti yang akan diberikan bantuan hampir 40 persen. Harapannya, dengan lebih banyaknya yang akan mendapat bantuan maka tidak ada warga miskin yang tercecer," akunya.

Akan tetapi diakui persoalan data bukan masalah ringan. Pasalnya, DTKS dari Kementerian Sosial ternyata perlu ditelusuri satu persatu. Hal ini karena data penerima bantuan tidak berdasarkan KK namun nama individu. Dari temuan

terakhir yang dilakukan tim Pemkot, dalam satu KK ada yang menerima hingga beberapa jenis bantuan, karena yang tertulis bukan kepala keluarga melainkan anak atau istrinya. Belum lagi sekitar 4.000 data yang belum bisa diterima Kementerian Sosial, padahal data itu sebelumnya dari DTKS.

Meski demikian, sinkronisasi data menjadi pekerjaan utama dari Dinas Sosial Kota Yogya yang melibatkan unsur wilayah. Ditargetkan, pekan ini persoalan data selesai dan paling lambat pekan depan bantuan sudah bisa disalurkan. "Khusus yang dari APBD Kota Yogya, akan kami berikan tunai melalui Kantor Pos. Jika harus membukakan rekening, bisa memakan waktu lama dan harus disisakan dana yang mengendap di rekening," tandasnya. (Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005